

# ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Joan Marta  
Dewi Zaini Putri

**Abstract :** *With the policy of regional autonomy, the area required to be able to find and develop the economic potential of its superior so that the area can attempt to optimize its performance for superior economic potential can be exploited optimally. Economic growth is not accompanied by employment growth can be a serious problem in the process of economic development of a region. This study aims to look at the pattern and structure of regional economic growth districts in West Sumatra and other sectors of the economy whatever be seeded and how the absorption of labor in the superior sector. To achieve these objectives, the author uses the analysis of Location Quotient (LQ), Model Growth Ratio (MRP), and Overlay. As for seeing the absorption of labor used in the LQ analysis employment. LQ analysis results during the analysis period (2006-2008) showing the city of Padang is an area that has the most basic sector that is as much as 6 sectors. While the district that has at least the basic sector is the Mentawai Islands regency and Pasaman district which has only 2 sectors consistent basis throughout the year of analysis. Overlay analysis of the results as a whole shows that there are 3 sectors of the economy owned by Regency / Municipality in West Sumatra Province entered in the first criterion is positive for all three components bernotasi (+++). The three economic sectors are trade, hotels, and restaurants in the district town of Bukittinggi West Pasaman and then transport and communications sector in the district and the city of Padang Pariaman last Payakumbuh and financial sector, leasing, and service companies in the city of Padang, the city Padang Panjang, Bukittinggi city and town Payakumbuh. From the analysis of employment LQ sides on four main sectors, still found a number of sectors which do not become the basis of the employment base. The development of leading sectors which can absorb high labor should be the main focus of government. However, the development of the seed sector should not ignore other economic sectors that still have the possibility to develop in the future. The development should be done in cross-sectoral, integrated, and consistent.*

**Kata kunci :** *Unemployment, Economic growth , Location Quotient (LQ), Model Growth Ratio (MRP), and Overlay*

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik (Tjokroamidjojo, 1995). Pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan sumberdaya yang ada di sekelilingnya, seperti sumber daya alam, manusia, dan teknologi untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk mencapai keberhasilan dalam setiap pelaksanaan pembangunan ternyata memerlukan adanya suatu perencanaan yang disusun secara teliti dan sistematis sejak awal pelaksanaannya, dalam arti mampu untuk memperhitungkan segala aspek yang berkaitan

dengan kelancaran proses pembangunan secara menyeluruh.

Tumbuh kembangnya sektor-sektor yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi memang jika dilihat secara detail, sangat tergantung pada manajemen pengelolaan yang efektif dan efisien dalam proses yang luas. Artinya sektor-sektor tersebut akan bisa maksimal jika upaya pengembangannya mampu di sesuaikan dengan kontribusi dan kebutuhan yang diinginkan. Karena jika tidak dilakukan proses penyeimbangan terhadap *demand dan supply*, maka yang terjadi adalah produktivitas pembangunan menjadi menurun dan akhirnya berpengaruh secara negatif pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 1976).

Salah satu fakta empiris yang terjadi dalam perjalanan pembangunan ekonomi di negara ini yang masih bisa di telusuri sebagai bukti dari dampak pengelolaan ekonomi negara yang kurang tepat adalah meningkatnya pengangguran atau terbatasnya lapangan kerja. Oleh karena itu paling tidak dengan adanya kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang bertambah serta lapangan kerja yang terbatas, maka upaya-upaya untuk mengatasi keterpurukan ekonomi terutama mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja harus segera dilakukan. Alasannya karena akumulasi masalah pengangguran menjadi awal permasalahan sosial ekonomi lainnya. Peningkatan pengangguran secara signifikan berakibat pada penurunan pendapatan. Dalam jangka panjang daya beli rumah tangga menurun sehingga secara agregat pendapatan domestik ikut terpengaruh (Todaro, 1984).

Untuk itu kebijakan perekonomian dalam berbagai level harus diarahkan untuk sensitif menciptakan lapangan kerja baru. Dominasi sektor padat modal yang dikembangkan dan memberikan kontribusi semu pada pertumbuhan ekonomi harus diganti dengan pola padat karya. Proyek-proyek padat karya akan memberikan stimulus positif pada penyerapan tenaga kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Seiring dengan era otonomi daerah, maka wewenang dari pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing, hal tersebut juga terjadi di propinsi Sumatera Barat. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memperluas kesempatan kerja di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral, dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah akan ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah dan makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif penelitian ini, Propinsi Sumatera Barat sebagai wilayah penelitian pun memiliki dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Berbagai indikasi yang telah ditunjukkan mengarah pada satu pola pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat tidak lepas dari sejauhmana pengelolaan potensi yang dimiliki, serta bagaimana pemanfaatan potensi tersebut. Potensi ini tentunya masih memerlukan pengelolaan secara opti-

mal dan terintegrasi, sehingga nantinya secara efektif mampu menunjang pembangunan Propinsi Sumatera Barat ke depan. Dampak krisis ekonomi dan tuntutan globalisasi telah disikapi dengan berbagai kebijakan ekonomi beserta berbagai program dan kegiatan, guna dapat meringankan beban masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan pengangguran. Kondisi ini di masa depan terus dikembangkan dan dipertajam sasarannya.

Dengan pemahaman kondisi tersebut maka paling tidak, dasar untuk melakukan kajian terhadap aspek penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sumatera Barat akan menjadi tematik yang sangat penting. Sehingga diharapkan dari penelitian ini, minimal dapat dipahami aspek penting penyerapan tenaga kerja di Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu problem yang perlu di cari solusinya. Oleh karena itu penelitian ini diajukan guna penelusuran lebih lanjut pada permasalahan bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor unggulan tersebut?

## TINJAUAN LITERATUR

### Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang paling penting di dalam suatu aktivitas produksi dibandingkan dengan sarana produksi yang lainnya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber ini untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Manning dan Zainab (1989), bahwa: "tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi".

Dalam Undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berikut ini adalah pengertian tenaga kerja menurut beberapa ahli, yaitu, (1) Esmara (1981); tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, (2) Djojohadikusumo (1987); tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang

menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja, (3) Simanjuntak (1985); tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang sedang atau sudah bekerja, maupun sedang mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

### Elastisitas Permintaan Akan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja didefinisikan sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan :

$$e = \frac{\Delta N / N}{\Delta W / W}$$

Dimana :

- e : Elastisitas permintaan akan tenaga kerja
- $\Delta N$  : Perubahan jumlah pekerja yang terjadi
- N : Jumlah yang bekerja mula-mula
- $\Delta W$  : Besarnya perubahan tingkat upah
- W : Tingkat upah yang sedang berlaku

### Teori Basis Ekonomi

Teori basis ini didasari oleh pemikiran J.S.Mill yaitu bahwa dalam memecahkan masalah pertumbuhan dan pemerataan regional diisyaratkan adanya perdagangan antar daerah, dengan mewujudkan spesialisasi daerah. Dalam teori basis ini perekonomian regional dibagi dua, yaitu kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat diluar batas perekonomian yang bersangkutan atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

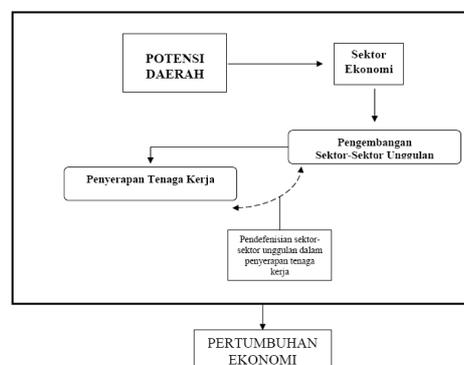
Dasar pemikiran teori basis ekonomi menurut Kadariah (1985) adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di dalam maupun di luar daerah, maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan kedalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu ada pengangguran, maka kesempatan kerja

yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan. Kenaikan pendapatan itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan hasil Industri lokal non basis dan permintaan ini selanjutnya akan menaikkan investasi di industri-industri non basis. Dengan kata lain penanaman modal di sektor-sektor lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dan industri-industri basis.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya, meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya dikembangkan di suatu daerah.

Pada intinya teori basis ekonomi berusaha menjelaskan perubahan-perubahan struktur perekonomian regional dengan menekankan saling hubungan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian regional dan perambatan kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu sektor ke sektor lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini teori basis ekonomi dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor mana yang sebaiknya dikembangkan sesuai dengan spesialisasi sektor disuatu daerah tertentu (Adisasmita, 1998).

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat serta mengetahui bagaimana penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor unggulan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif – kuantitatif.

Jadi penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah untuk mendeskripsikan suatu gejala sosial, suatu kondisi pada masa sekarang dengan melakukan penghitungan data untuk mengidentifikasi potensi sektor-sektor unggulan serta penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan tersebut di Propinsi Sumatera Barat.

### Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah wilayah generalisasi dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sekaran, 1992 dalam Khusaini, 2006). Oleh karena itu maka cakupan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat

### Alat Analisis

Metodologi merupakan cara atau sistem untuk melakukan analisa data, karena itu metodologi akan banyak berhubungan dengan tahap-tahap dalam melakukan analisa. Kesemuanya ini dilakukan untuk mendapatkan hasil analisa yang sistematis dan akurat. Selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka digunakan beberapa teknik analisa seperti berikut :

#### Analisa LQ (Location Quotient)

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ), teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Sehingga melalui analisis LQ, akan semakin mempertajam sejauh mana suatu daerah memiliki potensi yang bisa diukur secara terstruktur dalam memahami kontribusi potensi yang dimiliki, yang dalam hal ini lebih melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor yang nantinya akan dianalisis me-

lalui pendekatan LQ ini, untuk menentukan sektor-sektor mana yang pada wilayah kecamatan ini memiliki unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu maka untuk mempermudah dalam aplikasi sistem yang terkandung dalam model ini, maka dirumuskan dalam sebuah formula. Formula tersebut antara lain adalah: (Tarigan, 2004 :78) :

$$LQ = \frac{q_i / q_r}{Q_i / Q_n}$$

Keterangan :

- LQ Koefisien Location Quotient
- Q<sub>i</sub> Output/jumlah TK sektor i wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat)
- q<sub>i</sub> Output/jumlah TK sektor i wilayah Studi (Kab/Kota di Sumatera Barat)
- Q<sub>n</sub> Output/jumlah TK total wilayah referensi (Provinsi Sumatera Barat)
- q<sub>r</sub> Output/jumlah TK total wilayah studi (Kab/Kota di Sumatera Barat)

Kriteria pengukuran LQ menurut Bendavid Val, (1991:74, Kuncoro, 2002) yaitu ; (1) Bila LQ >1 berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat nasional, dengan kata lain berarti subsektor tersebut merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah ; (2) Bila LQ < 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional, dengan kata lain subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah ; (3) Bila LQ = 1 : berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional.

#### Model Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio Model*)

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kita yang diperoleh dengan memodifikasi model analisis *Shift-Share*. Model ini diturunkan dari persamaan awal komponen utama dalam analisis *Shift and Share* yakni, *Differential Shift* dan *Proportionality Shift*.

Secara matematik *Differential Shift* dapat ditulis sebagai berikut :

$$D_{ij} = \left[ \frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij}} - \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \right] E_{ij} (t)$$

Proportionality Shift dapat ditulis secara sistematis :

$$P_{ij} = \left[ \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} - \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \right] E_{ij}(t)$$

Dimana :

$$\Delta E_{iR} = E_{iR(t+n)} - E_{iR(t)}$$

$$\Delta E_R = E_{R(t+n)} - E_{R(t)}$$

Keterangan :

$\Delta E_{ij}$  adalah perubahan pendapatan kegiatan  $i$  di wilayah studi pada periode waktu  $t$  dan  $t + n$ ,

$n$  adalah tahun antara dua periode,

$\Delta E_{iR}$  adalah perubahan pendapatan kegiatan  $i$  di wilayah referensi

$\Delta E_R$  adalah perubahan pendapatan kegiatan di wilayah referensi

$E_{ij}$  adalah pendapatan kegiatan  $i$  di wilayah studi,

$E_{iR}$  adalah pendapatan kegiatan  $i$  di wilayah referensi

$E_R$  adalah pendapatan di wilayah referensi

Terdapat dua rasio pertumbuhan dalam analisis tersebut, yaitu (a) rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR) dan (b) rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS)

#### Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)

RPR adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan  $i$  wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi

$$\begin{aligned} \frac{P_{ij}}{E_{ij(t)}} &= \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} - \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \\ &= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} - \frac{\Delta E_R E_{iR(t)}}{E_{R(t)} E_{iR(t)}} \\ &= \left[ \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} - 1 \right] \frac{\Delta E_R}{E_{R(t)}} \\ &= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} E_{R(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} \\ &= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR} \Delta E_R} \end{aligned}$$

$$\frac{P_{ij}}{E_{ij(t)}} \cdot \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R} = \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR} \Delta E_R} - 1$$

$$\begin{aligned} \frac{P_{ij} E_{R(t)}}{E_{ij(t)} \Delta E_R} + 1 &= \frac{\Delta E_{iR} E_{R(t)}}{E_{iR(t)} \Delta E_{iR}} \\ &= \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}} \end{aligned}$$

$$RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR(t)}}{\Delta E_R / E_{R(t)}}$$

#### Model Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS)

RPS adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan  $i$  di wilayah studi dengan laju pertumbuhan kegiatan  $i$  wilayah referensi

$$\begin{aligned} D_{ij} &= \left[ \frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} - \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \right] E_{ij(t)} \\ D_{ij} &= \left[ \frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} E_{ij(t)} \right] - \left[ \frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} E_{ij(t)} \right] \end{aligned}$$

$$D_{ij} = \frac{\Delta E_{iR} - \Delta E_{ij(t)}}{E_{iR(t)}}$$

$$\frac{\Delta E_{iR}}{E_{iR(t)}} \cdot \frac{E_{R(t)}}{E_{R(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R}$$

$$\frac{D_{ij} E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR} E_{ij(t)}} = \frac{\Delta E_{ij} E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR} E_{ij(t)}} - 1$$

$$= \frac{\Delta E_{iR} \Delta E_{ij(t)}}{E_{iR(t)} E_{ij(t)}} \times \frac{E_{R(t)}}{\Delta E_R}$$

$$= \frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij}} \cdot \frac{E_{iR(t)}}{\Delta E_{iR}}$$

$$RP_S = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR} / E_{R(t)}}$$

Hasil perhitungan model ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) Klasifikasi 1, yaitu nilai RPR (+) dan RPS (+) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat kota/ kabupaten, kegiatan ini disebut sebagai dominan pertumbuhan, (b) Klasifikasi 2, yaitu nilai RPR (+) dan RPS (-) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat kota/ kabupaten belum menonjol, (c) Klasifikasi 3, yaitu nilai RPR (-) dan RPs (+) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada tingkat kota/ kabupaten termasuk menonjol, (d) Klasifikasi 4, yaitu nilai RPR (-) dan RPs (-) berarti kegiatan i tersebut pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan rendah demikian pula pada tingkat kota/ kabupaten.

#### **Metode Overlay**

Metode ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode LQ dengan metode Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs).

Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu juga sebaliknya jika nilai suatu sektor tidak mempunyai nilai positif berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan. Notasi positif berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu, dan negatif kurang dari satu.

RPR bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih dibanding pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sementara untuk metode LQ nilai positif hanya diberikan pada sektor ekonomi yang nilai koefisien LQ lebih dari 1 ( $LQ > 1$ ).

Dari analisis ini terdapat empat kemungkinan yaitu kombinasi antara sektor ekonomi unggulan yang menggambarkan keadaan suatu daerah sebagai berikut (a) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu sektor yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya, (b) Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu sektor yang pertum-

buhannya dominan tetapi kontribusinya kecil, (c) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, (d) Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu sektor yang tidak dominan baik kriteria pertumbuhan maupun kontribusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sektor – Sektor Basis di masing-masing Kabupaten/Kota**

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengeksport atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001 ; Lincolyn, 1997). Seperti diketahui bahwa sektor basis merupakan sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ > 1$  sedang sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai  $LQ < 1$ .

Hasil perhitungan dengan metode LQ menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 mengalami perubahan yang tidak berarti. Sektor basis di tiap kabupaten/kota cenderung tetap, tidak banyak sektor yang mengalami perubahan dari sektor bukan basis ke sektor basis demikian pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera barat mulai tahun 2006 sampai 2008 tidak banyak mengalami perubahan.

Secara lengkap berikut ini dapat dijelaskan hasil analisis LQ untuk masing-masing sektor selama 3 tahun sejak tahun 2006 sampai tahun 2008.

**Tabel 1. Hasil Kompilasi Analisis LQ di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Sektor									Jumlah Sektor Basis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Kabupaten</b>										
Kep. Mentawai	X					X				2
Pesisir Selatan	X		X			X			X	4
Solok	X	X			X					3
Sijunjung	X	X			X				X	4
Tanah Datar	X				X				X	3
Padang Pariaman	X	X		X			X		X	5
Agam	X	X	X							3
Lima Puluh Kota	X	X				X				3
Pasaman	X								X	2
Solok Selatan	X	X			X	X				4
Dharmas Raya	X	X			X					3
Pasaman Barat	X		X			X				3
<b>Kota</b>										
Padang			X	X		X	X	X	X	6
Solok				X	X		X	X	X	5
Sawahlunto		X			X			X	X	4
Padang Panjang				X	X		X	X	X	5
Bukittinggi				X		X	X	X	X	5
Payakumbuh				X	X		X	X	X	5
Pariaman	X			X	X			X		4

Sumber : Hasil analisis LQ per sektor

Keterangan : 1. Pertanian. 2. Pertambangan dan Penggalian. 3. Industri Pengolahan. 4. Listrik, Gas dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan Hotel & Restoran. 7. Pengangkutan & Telekomunikasi. 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan. 9. Jasa - jasa

Berdasarkan Tabel 1. Sektor Pertanian merupakan sektor basis pada seluruh daerah kabupaten di Sumatera Barat yang berjumlah 12 kabupaten dan 1 daerah kota yakni kota Pariaman. Kemudian sektor basis yang hanya dimiliki oleh daerah kota di propinsi Sumatera barat dan tidak dimiliki pada daerah kabupaten adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.

### **Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Overlay**

Analisis model rasio pertumbuhan (MRP) merupakan salah satu alat analisis alternatif guna mendukung penentuan deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial bagi kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, MRP ini memiliki kemiripan dengan LQ, perbedaannya terletak pada cara menghitung, jika LQ menggunakan distribusi sedangkan MRP menggunakan kriteria pertumbuhan. Kedua hitungan ini MRP dan LQ (*overlay*) digabung untuk mendapatkan

hasil indentifikasi kegiatan sektor yang unggul, baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhannya (Yusuf, 1999).

Melalui overlay antara rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr), rasio pertumbuhan wilayah study (RPs) dan *location quotient* (LQ) dapat ditunjukkan identifikasi kegiatan-kegiatan unggulan. Koefisien dari ketiga komponen ini harus disamakan satuannya dengan diberi tanda atau notasi positif (+) atau negatif (-). Notasi positif (+) berarti koefisien komponen bernilai lebih dari satu, dan negatif (-) apabila kurang dari satu. RPr bernotasi positif artinya pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor i lebih tinggi dibanding pertumbuhan sektor yang sama di wilayah studi. Sedang LQ bernotasi positif berarti kontribusi sektor i terhadap PDRB di wilayah studi lebih tinggi dibanding kontribusi sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah referensi. Identifikasi sektor unggulan dari hasil overlay dibedakan

dalam tiga kriteria sebagai berikut, (1) Hasil overlay yang menunjukkan baik RPr, RPs dan LQ ketiganya bertanda Positif (+ + +), berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang tinggi di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota dan kontribusi sektoral Kabupaten/Kota tersebut lebih tinggi dari Propinsi. Artinya sektor tersebut mempunyai potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama di tingkat Propinsi, (2) Hasil overlay yang menunjukkan RPs dan LQ yang bernilai positif (- + +), berarti kegiatan sektoral di Kabupaten/Kota lebih unggul dibandingkan de-

ngan kegiatan setoral yang sama di tingkat Propinsi, baik sisi pertumbuhannya maupun kontribusinya. Dengan kata lain sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi Kabupaten/Kota tersebut. (3) Hasil overlay menunjukkan baik RPr, RPs dan LQ ketiganya bertanda negatif (- - -), berarti kegiatan sektor tersebut mempunyai pertumbuhan sektoral yang rendah di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota dan kontribusi sektoral di Kabupaten/kota lebih rendah dari Propinsi. Artinya sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Propinsi.

**Tabel 2 . Overlay Perekonomian Pada Masing-Masing Sektor per Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Sektor								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Kabupaten</b>									
Kep. Mentawai	-- +	---	---	- + -	- + -	+ + +	+ - -	+ - -	---
Pesisir Selatan	-- +	- + -	- + +	- + -	- + -	+ + +	+ - -	+ - -	- - +
Solok	- + +	- + +	- + -	- + -	- + +	+ + -	+ - -	+ + -	---
Sijunjung	-- +	- + +	- + -	- + +	- + +	+ - -	+ - -	+ - -	- + +
Tanah Datar	- + +	---	---	- + -	- + +	+ - -	+ - -	+ - -	- + +
Padang Pariaman	-- +	- + +	- + -	- + +	---	+ - -	+ + +	+ - -	- - +
Agam	- + +	- + +	- + +	---	---	+ - -	+ - -	+ - -	---
Lima Puluh Kota	- + +	- + +	---	- + -	- + -	+ + +	+ - -	+ - -	---
Pasaman	- + +	---	---	- + -	---	+ + -	+ - -	+ - -	- - +
Solok Selatan	- + +	- + +	---	- + -	- + +	+ + +	+ - -	+ - -	---
Dharmas Raya	-- +	- + +	---	- + -	- + +	+ - -	+ - -	+ + -	---
Pasaman Barat	- + +	---	- + +	- + -	- + -	+ + +	+ - -	+ - -	---
<b>Kota</b>									
Padang	- + -	- + -	- - +	- + +	- + -	+ + +	+ + +	+ + +	- - +
Solok	---	---	- + -	- + +	- + +	+ + -	+ + +	+ + +	- - +
Sawahlunto	- + -	- + +	- + +	- + -	- + +	+ - -	+ - -	+ + +	- - +
Padang Panjang	---	---	---	- + +	- + +	+ - -	+ + +	+ + +	- + +
Bukittinggi	---	---	---	- + +	---	+ + +	+ + +	+ + +	- - +
Payakumbuh	---	---	---	- + +	- + +	+ - -	+ + +	+ + +	- - +
Pariaman	- + +	---	- + -	- + +	- + +	+ - -	+ - -	+ - -	---

Sumber : BPS Sakernas 2008, Data Diolah

Keterangan : 1. Pertanian. 2. Pertambangan dan Penggalian. 3. Industri Pengolahan. 4. Listrik, Gas dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan Hotel & Restoran. 7. Pengangkutan & Telekom. 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan. 9. Jasa - jasa

Dari hasil analisis Overlay diatas secara keseluruhan terlihat bahwa ada 3 sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen (+++), artinya bahwa Kabupaten /Kota di

Propinsi Sumatera Barat memiliki sektor yang mempunyai pertumbuhan sektoral di tingkat Propinsi yang tinggi, pertumbuhan sektoral kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat Propinsi, dan kontribusi sektoral kabupaten /kota lebih tinggi pula dari tingkat Propinsi, atau yang

memiliki sektor dengan potensi daya saing kompetitif dan komparatif di Kabupaten /Kota lebih unggul dibandingkan kegiatan yang sama pada tingkat Propinsi Sumatera Barat, dan di Sumatera Barat sendiri sektor mempunyai prospek yang bagus. Ketiga sektor ekonomi tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada daerah kabupaten Pasaman Barat dan kota Bukittinggi kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi pada daerah kabupaten Padang Pariaman dan kota Payakumbuh dan yang terakhir sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada daerah kota Padang, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh.

### Analisis Penyerapan Tenaga Kerja

Pengelompokkan sektor basis menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) bersifat dinamis tergantung pada perkembangan kegiatan produksi dari sektor-sektor bersangkutan. Karena itu, sektor-sektor yang nilai LQnya sudah mendekati satu dalam satu atau dua tahun dapat saja menjadi sektor basis. Sedangkan sektor-sektor yang nilainya jauh dari satu, dalam waktu dekat diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti.

Untuk lebih mempertajam analisis tentang sektor unggulan yang sekaligus mampu menyerap tenaga kerja maka dilakukan analisis LQ dengan menggunakan data ketenagakerjaan. Dikarenakan keterbatasan sumber data yang diperoleh dari Survey Ketenagakerjaan Nasional Tahun 2008 (Sakernas), maka analisis LQ dari sisi penyerapan tenaga kerja ini hanya menampilkan 4 sektor utama dan sisanya digabung pada satu bahagian. Keempat sektor yang dianalisis tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan Sektor Jasa-Jasa, kemudian bahagian terakhir merupakan gabungan dari Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Listrik, Gas, dan Air. Bangunan, Sektor Keuangan, Persewaan, dan jasa perusahaan.

Untuk memperoleh hasil analisis penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan pada masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat digunakan model gabungan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Model ini menggabungkan antara analisis Overlay dan LQ sisi penyerapan tenaga kerja. Analisis Overlay berguna untuk melihat besarnya pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat, sehingga bisa

diketahui sektor-sektor unggulan yang terdapat pada masing-masing daerah tersebut. Sedangkan analisis LQ sisi penyerapan tenaga kerja berguna untuk mengetahui sejauh mana masing-masing sektor yang ada mampu menyerap tenaga kerja pada daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Hasil gabungan analisis ini secara rinci akan dijelaskan pada bahagian di bawah ini.

### Sektor Pertanian.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3. menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis yang mampu menyerap tenaga kerja pada seluruh daerah kabupaten yang ada di Sumatera barat kecuali kabupaten Padang Pariaman. Hal ini tercermin dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). sektor ini mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diharapkan dapat menjadi penunjang perkembangan sektor-sektor lainnya. Sedangkan pada kabupaten Padang Pariaman sektor pertanian ini merupakan sektor basis tetapi belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja, ini tercermin dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang kecil dari satu ( $LQ < 1$ ). Dilihat dari hasil analisis overlay sektor ini sedang mengalami penurunan pada periode analisis, hal ini terlihat dari nilai RPs yang negatif (-), kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah kabupaten sehingga sektor ini bisa dimaksimalkan sebagai salah satu sektor basis penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 3. Hasil Analisis Overlay, dan LQ Tenaga Kerja Sektor Pertanian pada Tiap Kabupaten/ Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Overlay Notasi	LQ Tenaga Kerja
<b>Kabupaten</b>		
Kep. Mentawai	- - +	1,49
Pesisir Selatan	- - +	1,09
Solok	- + +	1,24
Sijunjung	- - +	1,11
Tanah Datar	- + +	1,03
Padang Pariaman	- - +	0,88
Agam	- + +	1,01
Lima Puluh Kota	- + +	1,07
Pasaman	- + +	1,32
Solok Selatan	- + +	1,29
Dharmas Raya	- - +	1,22
Pasaman Barat	- + +	1,30
<b>Kota</b>		

Pariaman	--+	0,43
----------	-----	------

Sumber : BPS Sakernas 2008, Data Diolah

Kemudian untuk daerah kota di Sumatera Barat, sektor pertanian ini merupakan sektor basis hanya pada kota Pariaman namun tidak menjadi basis dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang kecil dari satu ( $LQ < 1$ ). Ini berarti pada kota Pariaman sektor pertanian yang menjadi sektor basis belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja.

### Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4. menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor basis pada lima daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat daerah-daerah tersebut adalah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Agam, kabupaten Pasaman Barat, kota Padang, dan kota Sawahlunto. Namun daerah yang sektor basisnya sebagai basis penyerapan tenaga kerja hanya pada daerah kabupaten Agam dan kota Sawahlunto. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Sedangkan untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan kota Padang sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja, ini tercermin dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang kecil dari satu ( $LQ < 1$ ).

**Tabel 4. Hasil Analisis Overlay dan LQ Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan pada Tiap Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Overlay Notasi	LQ Tenaga Kerja
<b>Kabupaten</b>		
Pesisir Selatan	- + +	0,64
Solok	- + -	0,18
Sijunjung	- + -	0,78
Padang Pariaman	- + -	1,83
Agam	- - +	1,87
Pasaman Barat	- - +	0,25
<b>Kota</b>		
Padang	- - +	0,59
Solok	- + -	0,92
Sawahlunto	- - +	2,72
Pariaman	- + -	3,66

Sumber : BPS Sakernas 2008, Data Diolah

Dilihat dari hasil analisis overlay sektor ini di beberapa daerah seperti kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat sedang mengalami penurunan pada periode analisis, hal ini terlihat dari nilai RPs yang negatif (-), kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat sehingga sektor ini bisa dimaksimalkan sebagai salah satu sektor basis penyerapan tenaga kerja.

Kemudian selama periode analisis ada daerah seperti kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman yang sektor industri pengolahan ini merupakan sektor basis penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Namun keadaan ini belum memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah tersebut, tetapi sudah memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Ini terlihat dari nilai RPs yang positif (+). Kondisi seperti ini menggambarkan adanya potensi yang bisa dimanfaatkan pada sektor industri pengolahan sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

### Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5. menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor basis pada tujuh daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat daerah-daerah tersebut adalah kabupaten Kepulauan Mentawai, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman Barat, kota Padang, dan kota Bukittinggi. Namun daerah yang sektor basisnya sebagai basis penyerapan tenaga kerja hanya pada daerah kota Padang dan Kota Bukittinggi. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Sedangkan untuk daerah Kepulauan Mentawai, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman Barat sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja, ini tercermin dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang kecil dari satu ( $LQ < 1$ ).

Kemudian selama periode analisis ada daerah kota solok memiliki sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini merupakan sektor basis penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Namun keadaan ini belum memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah tersebut, tetapi sudah memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Ini terlihat dari nilai RPs yang positif (+). Kondisi seperti ini

menggambarkan adanya potensi yang bisa dimanfaatkan pada sektor industri pengolahan sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

**Tabel 5. Hasil Analisis Overlay, dan LQ Tenaga Kerja Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran pada Tiap Kabupaten /Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Overlay Notasi	LQ Tenaga Kerja
<b>Kabupaten</b>		
Kep. Mentawai	+ - +	0,14
Pesisir Selatan	+ - +	0,74
Solok	++-	0,61
Lima Puluh Kota	+ - +	0,59
Pasaman	++-	0,44
Solok Selatan	+ - +	0,44
Pasaman Barat	+++	0,64
<b>Kota</b>		
Padang	+ - +	2,60
Solok	++-	2,26
Bukittinggi	+++	3,24

Sumber : BPS Sakernas 2008, Data Diolah

### Sektor Jasa-Jasa

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6. menunjukkan bahwa sektor jasa-jasa merupakan sektor basis pada sebelas daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat daerah-daerah tersebut adalah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Pasaman, kota Padang, kota Solok, kota Sawahlunto, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh.

**Tabel 6. Hasil Analisis Overlay dan LQ Tenaga Kerja Sektor Jasa-Jasa pada Tiap Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2008**

Kabupaten/Kota	Overlay Notasi	LQ Tenaga Kerja
<b>Kabupaten</b>		
Pesisir Selatan	- - +	0,71
Sijunjung	- + +	0,69
Tanah Datar	- + +	1,03
Padang Pariaman	- - +	0,64
Pasaman	- - +	0,41
<b>Kota</b>		
Padang	- - +	3,35
Solok	- - +	2,51
Sawahlunto	- - +	1,80
Padang Panjang	- + +	2,42

Bukittinggi	- - +	3,24
Payakumbuh	- - +	2,28

Sumber : BPS Sakernas 2008, Data Diolah

Namun daerah yang sektor basisnya sebagai basis penyerapan tenaga kerja hanya pada daerah kabupaten Tanah Datar, kota Padang, kota Solok, kota Sawahlunto, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh. Hal ini terlihat dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Sedangkan untuk daerah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Pasaman sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja, ini tercermin dari nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja yang kecil dari satu ( $LQ < 1$ ). kondisi ini perlu mendapat perhatian dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat sehingga sektor basis ini bisa dimaksimalkan sebagai salah satu sektor basis penyerapan tenaga kerja.

Dari hasil analisis di atas dengan menggunakan nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja pada empat sektor utama, masih ditemukan sejumlah sektor basis yang tidak menjadi basis penyerapan tenaga kerja. Untuk sektor pertanian yang menjadi sektor basis pada 13 daerah kabupaten/kota namun pada kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk sektor industri pengolahan yang menjadi sektor basis bagi 5 daerah kabupaten/kota namun pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan kota Padang sektor ini juga belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang merupakan sektor basis bagi 7 daerah kabupaten kota namun pada daerah Kepulauan Mentawai, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman Barat sektor ini tidak menjadi basis penyerapan tenaga kerja. Terakhir sektor jasa-jasa yang menjadi sektor basis pada 11 daerah kabupaten/kota namun pada daerah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Pasaman sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Hasil analisis LQ menunjukkan Kota Padang merupakan daerah yang paling banyak memiliki sektor basis yaitu sebanyak 6 sektor. Sedangkan kabupaten yang memiliki sektor basis paling sedikit adalah

kabupaten Kepulauan Mentawai dan kabupaten Pasaman yang hanya memiliki 2 sektor basis konsisten sepanjang tahun analisis, (2) Dari hasil analisis Overlay secara keseluruhan terlihat bahwa ada 3 sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat masuk dalam kriteria pertama yang bernotasi positif untuk ketiga komponen (+++). Ketiga sektor ekonomi tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada daerah kabupaten Pasaman Barat dan kota Bukittinggi kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi pada daerah kabupaten Padang Pariaman dan kota Payakumbuh dan yang terakhir sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada daerah kota Padang, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh ; (3) Dari hasil analisis nilai LQ sisi penyerapan tenaga kerja pada empat sektor utama, masih ditemukan sejumlah sektor basis yang tidak menjadi basis penyerapan tenaga kerja. Untuk sektor pertanian yang menjadi sektor basis pada 13 daerah kabupaten/kota namun pada kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kemudian untuk sektor industri pengolahan yang menjadi sektor basis bagi 5 daerah kabupaten/kota namun pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan kota Padang sektor ini juga belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang merupakan sektor basis bagi 7 daerah kabupaten kota namun pada daerah Kepulauan Mentawai, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten Solok Selatan, kabupaten Pasaman Barat sektor ini tidak menjadi basis penyerapan tenaga kerja. Terakhir sektor jasa-jasa yang menjadi sektor basis pada 11 daerah kabupaten/kota namun pada daerah kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung, kabupaten Padang Pariaman, kabupaten Pasaman sektor ini belum maksimal dalam hal penyerapan tenaga kerja.

## SARAN

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan potensi daerahnya terutama yang berhubungan dengan sektor-sektor perekonomian harus mempertimbangkan aspek penyediaan lapangan pekerjaan. Sektor-sektor unggulan yang berorientasi ekspor dan memiliki rasio pertumbuhan yang baik serta memberikan peluang peningkatan lapangan kerja perlu diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan penyerap tenaga kerja di masa yang akan datang sehingga diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain

untuk berkembang. Namun, pengembangan sektor unggulan hendaknya tidak mengabaikan sektor-sektor ekonomi lainnya yang masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang di masa yang akan datang. Pengembangan tersebut hendaknya dilakukan secara lintas sektoral, terintegrasi, dan konsisten.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan ekonomi Daerah, Edisi Kedua, Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
- Bellante, Don dan Mark Jackson. 1990. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. LPFE-UI. Jakarta.
- Glasson John (1990). Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur.
- Kuncoro, 2002, Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi empiris di Kalimantan selatan 1993-1999, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No.1, 2002.
- Kuncoro., Adji, A., & Pradipto, R. (1997). *Ekonomi Industri : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Widya Sarana Informatika. Jogjakarta.
- Nurdiana Fitri Isnaini. 2002. *Identifikasi Sektor Basis Dengan Pendekatan Analisis Location Quotient Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Mojokerto*.
- Prasetyo Soepono (2001). *Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor) Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
- Riachardson Harry.,W. (1977). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.
- Sjafrizal (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma. LP3ES No.3 Tahun XXVI. Jakarta.
- Sumatera Barat dalam Angka. 2008. Padang : Biro Pusat Statistik.
- Tarigan, Robinson. 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Pendekatan ekonomi dan ruang*. Depdiknas, Dirjen PT, Medan.
- Todaro, M.P. 1986. *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*. Terjemahan, Jakarta : Intermedia.
- Yusuf Maulana (1999). *Model Ratio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu alat*

*Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

Indonesia. Vol XLVII No.2.